

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021

## TAJUK RENCANA

## Batalan Perekrutan Napi Kasus Korupsi

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan narapidana kasus korupsi dalam program penyuluhan antikorupsi menimbulkan kekecewaan. Meskipun terjadi kehebohan, KPK ternyata telah menyeleksi napi koruptor di Lapas Sukamiskin dan Tangerang. Asal tahu, KPK menemukan tujuh koruptor yang dinyatakan lolos. Mereka itu akan dilibatkan dalam program penyuluhan antikorupsi. Siapa saja mereka? Mereka adalah para narapidana yang akan bebas atau masa hukumannya hampir selesai.

Apakah alasan melibatkan mereka? Ketua KPK, Firlil Bahuri pernah menyatakan narapidana kasus korupsi bisa menjadi agen antikorupsi ketika sudah berbaur di masyarakat. Menurut Firlil, para pelaku korupsi yang sudah menjalani hukuman itu bisa menyebarkan bahaya korupsi, sehingga mereka dijadikan sebagai agen untuk memberi penyuluhan antikorupsi supaya orang-orang tidak melakukan korupsi. Firlil tak menjelaskan apakah memang ada kajian yang menyebutkan "napi koruptor bisa jadi penyuluh antikorupsi".

Keruan saja timbul kritik atas usulan KPK yang dianggap tak masuk akal itu. Novel Baswedan, pegawai nonaktif KPK, misalnya, mengkritik keras usulan itu. Baswedan bilang, tindakan KPK keterlaluan dan dianggap tidak paham terhadap perkorupsian. Paling tidak ini mencederai rasa keadilan karena pegawai-pegawai baik yang sangat antikorupsi justru disingkirkan dan malah lebih memilih narapidana kasus korupsi. Selain keterlaluan tindakan KPK dianggap bakal menyebarkan perkorupsian.

## Tak Cukup dengan Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi jumlah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran dominan dalam perekonomian negeri ini. Wajar bila terdapat Kementerian yang bertugas menangani mereka. Penanganan dilakukan antara lain dengan memberi pembinaan agar UMKM lebih dari sekadar eksis. Diharapkan mereka terus tumbuh dan berkembang. Tentu kuncinya adalah kemampuan dalam bersaing. Mau tidak mau penguasaan teknologi menjadi keniscayaan untuk mendekati dan meraih konsumen.

Saat ini, penguasaan teknologi identik dengan adaptasi terhadap digitalisasi yang menyeruak ke dalam beragam aspek kehidupan. Di tengah berbagai pembatasan sebagai upaya mitigasi Covid-19, adaptasi tidak bisa lagi ditunda-tunda. Namun, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 30 Juni 2021, UMKM yang masuk dalam ekosistem digital baru sebanyak 14,6 juta unit. Jumlah itu hanya 22 persen dari keseluruhan jumlah UMKM yang ada di negeri ini. Akselerasi perlu dilakukan.

Percepatan bagi digitalisasi UMKM membutuhkan komitmen bersama. UMKM identik dengan keterbatasan. Pembinaan dan pendampingan terhadap mereka dibutuhkan, dengan target awalnya adalah peningkatan jumlah UMKM yang terdata dalam aplikasi One Single Submission (OSS). Sampai akhir semester pertama tahun ini, baru 2,6 juta UMKM yang terdata pada aplikasi tersebut. Dengan terintegrasi ke dalam OSS, para pelaku UMKM akan bisa mengurus perizinan dengan mudah dan cepat.

Usulan KPK juga dianggap sebagai propaganda gratis betapa melakukan tindakan korupsi itu bukan perilaku yang bakal diberi hukuman setimpal. Banyak orang bilang, pelaku korupsi itu bisa aman-aman saja jika tidak ketahuan. Jika ketahuan hanya akan mendapatkan hukuman ringan. Bahkan dalam kasus Juliar Batubara, hinaan publik kepada koruptor bakal bisa dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Sudah hukumannya ringan, jika beruntung bisa direkrut oleh KPK untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Sungguh tak masuk akal perlakuan terhadap koruptor saat ini.

Pimpinan KPK sebaiknya mendengarkan kritik-kritik yang muncul. Jika tidak, bukan tidak mungkin para napi penyuluh itu bisa menjadi pemimpin KPK pada masa depan. Sangat beralasan jika mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mencuit di Twitter: "Ke depan perlu terobosan lebih berani. Bukan hanya menjadikan eks napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi, tapi menjadikan mereka Pimpinan KPK." Sangat beralasan juga jika KPK didorong untuk tak mewujudkan perekrutan narapidana koruptor sebagai penyuluh.

Kita tentu berharap perekrutan narapidana kasus korupsi, sehebat apa pun mereka melakukan penyuluhan antikorupsi, tak jadi diwujudkan. Kita masih berharap KPK menjadi lembaga yang benar-benar melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kita tak ingin KPK menjadi lembaga yang memiliki ide-ide kontroversial yang justru menjauhkan dari pemberantasan korupsi. Jangan sampai hari-hari ini orang bilang, "KPK telah menjauhkan dirinya dari persoalan-persoalan perkorupsian".

Lewat formalitas usaha, UMKM memiliki pijakan lebih kuat bagi pengembangan usahanya. Untuk berkembang, digitalisasi menjadi kebutuhan mutlak saat ini. Namun, penguasaan teknologi tetap membutuhkan dukungan lain, terutama pada sisi kelembagaan. Karena itu, menyadarkan pelaku UMKM untuk bersinergi diperlukan. Sinergi bisa dilakukan dengan membentuk koperasi. Terlebih persyaratan pendirian koperasi telah dipermudah, seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Saat ini, koperasi bisa dibentuk cukup dengan sembilan anggota. Sebelumnya minimal koperasi harus beranggotakan 20 anggota. Pembentukan koperasi akan memperkuat daya tawar dan memungkinkan suatu usaha beroperasi pada level skala ekonomi. Dalam kunjungan kerjanya di Purbalingga beberapa hari lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meresmikan koperasi yang memasarkan produksi para petani. Lewat koperasi, kebersamaan tak hanya dalam mengakses pasar.

Koperasi juga bisa memungkinkan anggotanya mengakses pembiayaan. Efisiensi usaha pun bisa didapat, karena kebersamaan akan meningkatkan daya tawar dalam memperoleh bahan baku. Aspek kelembagaan memang menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kapasitas bersaing. Dengan kestrategisan peran UMKM dalam perekonomian negeri ini, pembinaan yang membawa UMKM mampu memajukan penguasaan teknologi dengan kesadaran membangun kebersamaan dibutuhkan.

## Realita dan Angka Ekonomi

Oleh Purwoko



Realita di lapangan, produktivitas usaha masyarakat masih rapuh akibat kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, sehingga masyarakat seolah tidak percaya jika saat pandemi ini ada peningkatan pendapatan nasional.



**RILIS** Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5 Agustus 2021, ditanggapi beragam oleh pakar ekonomi maupun masyarakat awam karena angka yang ditorehkan dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih susah akibat kebijakan pembatasan penyebaran virus Covid-19.

Di saat masyarakat sedang susah akibat pemaksaan penutupan usaha dan ada sebagian yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat ke angka 7,07% pada kuartal II 2021 secara *year on year* (yoy) dari angka -5,32% pada kuartal II 2020 dan pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,31% secara *quarter-to-quarter* (q-to-q) dari angka -0,74% pada kuartal I 2021. Dengan angka 7,07% berarti Indonesia telah lepas dari status resesi yang telah dialami sejak kuartal III 2020.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Namun dengan melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih susah karena terbatasnya gerak langkah usahanya dan terdegradasi kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sulit rasanya menerima angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% yang jauh dari kondisi angka -0,74%. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata justru bertentangan dengan realita ekonomi masyarakat.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan *output* atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merepresentasikan pendapatan

nasional riil yang dihitung dari keseluruhan *output* dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara.

Realita di lapangan, produktivitas usaha masyarakat masih rapuh akibat kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, sehingga masyarakat seolah tidak percaya jika saat pandemi ini ada peningkatan pendapatan nasional. Hal ini tentu terkait dengan pendapatan riil masyarakat yang saat ini juga jauh dari pendapatan pada kuartal II 2020. Jadi sulit dipercaya jika pada kuartal II 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7,07%.

## Indikator Ekonomi

Jika melihat indikator kesejahteraan masyarakat, kondisi kesejahteraan masyarakat pada kuartal II 2021 jika dibanding kuartal II 2020 tentu masih lebih baik saat kuartal II 2020 karena masyarakat pada kuartal II 2020 belum begitu parah terdampak oleh pandemi Covid-19. Jadi jika saat ini dinilai kesejahteraan masyarakat lebih baik dari kuartal II 2020 sulit untuk dipercaya. Saat ini realitas di lapangan, masyarakat sangat terhimpit kondisi ekonominya, apalagi dengan adanya kebijakan PPKM yang benar-benar membuat masyarakat sulit untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Apalagi jika ingin melihat indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi serapan tenaga kerja. Selama pandemi Covid-19 telah menghasilkan pengangguran baru akibat PHK sebanyak 1,1 juta orang, sementara munculnya pengangguran baru yang tidak teresap lapangan kerja sebanyak 2,6 juta orang. Aneh, jika serapan tenaga kerja memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat penyerapan tenaga kerja sampai Juni 2021 juga masih rendah dan pandemi telah melahirkan pengangguran yang jumlah keseluruhan mencapai 3,7 juta orang. Jadi, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% merupakan angka yang sulit dipercaya karena bertentangan

an dengan kondisi pengangguran saat ini.

PPKM yang diterapkan pemerintah telah menekan kondisi usaha dalam negeri. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut tak berlanjut sampai akhir tahun agar ekonomi bisa melaju lebih kencang. Tekanan terhadap ekonomi akibat kebijakan PPKM, akan memerosotkan kinerja industri pengolahan karena terbatasnya distribusi bahan baku, barang jadi maupun mobilitas karyawan.

Tidak terkecuali UMKM, usaha perhotelan, dan pariwisata, kuliner dan transportasi saat ini benar-benar terbunuh oleh keadaan. Oleh karena itu sulit untuk mempercayai angka 7,07% pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2021. Pertentangan-pertentangan keadaan di masyarakat dengan laporan pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah wajib untuk memberikan penjelasan agar tidak muncul sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Adanya kontradiksi antara kondisi ekonomi masyarakat dari berbagai indikator dengan angka-angka indikator pertumbuhan ekonomi nasional dapat melahirkan kekecewaan dalam menilai tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya jangan hanya bangga dengan pencapaian angka-angka statistik yang menggembirakan, tetapi pemerintah juga harus hati-hati dalam memberikan informasi kondisi ekonomi nasional.

Masyarakat saat ini sedang kewalahan untuk menyikapi PPKM, bahkan gerai-gerai supermarket pun telah luluh lantah tergerus oleh pandemi Covid-19. Karena itu jika ada kontradiksi antara realita dan angka pertumbuhan ekonomi harus ada penjelasan yang gamblang dari pemerintah agar tidak lahir kebingungan masyarakat. (46)

— Dr Purwoko MM, dosen MM FEB Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

## Kebangkitan Riset dan Inovasi saat Pandemi

Oleh Trihastuti Yuniati

**SUDAH** satu tahun lebih sejak munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sampai dengan Mei 2021 sudah ada 1,6 juta kasus Covid di negara kita. Berbagai upaya dan kebijakan sudah diambil oleh pemerintah, di antaranya kebijakan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan belajar dari rumah atau *school from home* (SFH).

Keterbatasan tersebut rupanya tidak hanya membawa dampak negatif, namun juga mendorong munculnya berbagai riset dan inovasi di Indonesia.

Dilansir dari situs Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id), 2 Maret 2021, pandemi Covid-19 ternyata telah menjadi momentum kebangkitan bagi kemandirian riset dan inovasi di Tanah Air.

Hal tersebut dibuktikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir tercatat sudah ada 61 produk inovasi karya anak bangsa yang telah dihasilkan sebagai upaya untuk penanganan pandemi Covid-19 di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) atau BRIN.

Beberapa inovasi tersebut antara lain ventilator yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman. Ventilator tersebut diinisiasi oleh Dr Syarif Hidayat, salah seorang dosen di Program Studi Teknik



Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Pengembangan ventilator tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatkan kebutuhan ventilator untuk penanganan Covid-19, sementara jumlah yang tersedia di rumah sakit sangat terbatas.

Selain ventilator, inovasi lain yang muncul yaitu alat pendeteksi Covid-19 berdasarkan bau ketiak yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Alat pendeteksi berbasis kecerdasan buatan tersebut diberi nama i-Nose C-19.

Dua kampus di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), pun tidak mau ketinggalan. ITTS mengembangkan alat *crane* pemulasaran jenazah Covid-19, robot *service ROSE, sterilization chamber* khusus alat perlindungan diri (APD), serta mobil fin komodo penyemprot desinfektan. Sedangkan ITTP mengembangkan *smart wastafel* berbasis *internet of things*

(IOT).

Selain berbagai perguruan tinggi di Indonesia, instansi yang lain pun turut berpartisipasi dalam riset dan inovasi. Biofarmas telah melakukan riset pengembangan vaksin Covid-19. Sedangkan di bidang teknologi informasi, adanya kebijakan WFH telah menjadikan penggunaan teknologi informasi menjadi berkembang pesat di segala bidang, salah satunya yaitu teknologi tanda tangan digital. Tanda tangan digital tersebut memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan basah, yaitu untuk mengesahkan suatu dokumen.

## Pemanfaatan TIK

Pandemi Covid-19 pun telah mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih familiar dengan dunia digital dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat "dipaksa" untuk meleak teknologi informasi, misalnya melakukan rapat, seminar, konferensi, juga pembelajaran jarak jauh secara *online* dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada, seperti Zoom, Google Meet, Webex, Discord, dan sebagainya.

Para pengajar (guru, dosen) dan peserta didik (siswa, mahasiswa) pun dituntut untuk terbiasa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan *learning management system* (LMS) atau berbagai *online course* lainnya baik yang gratis maupun berbayar, seperti Ruang Guru, Dicoding Academy, Udemy, Netacad, dan sebagainya.

Kebiasaan berbelanja pun mulai berubah dengan belanja secara online, dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada, baik melalui *marketplace*, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, juga melalui aplikasi berbasis mobile seperti Gojek atau Gofood.

Meskipun pada mulanya perubahan yang begitu mendadak ini tentunya sulit diterima oleh masyarakat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti faktor ekonomi dan pendidikan, namun lambat laun masyarakat akan menjadi terbiasa dan merasakan manfaatnya. Pandemi ini telah menjadi momentum bagi masyarakat untuk menuju ke era digital.

Pandemi Covid-19 memang telah membawa banyak dampak negatif bagi kita semua. Namun hikmahnya, adanya pandemi tersebut telah mendorong kebangkitan riset dan inovasi di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat perlu berkolaborasi dan bekerja sama agar kita bisa segera bangkit dari pandemi ini. (46)

— Trihastuti Yuniati SKom MT, dosen Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Kirimkan artikel wacana nasional ke: [wacana.nasional@gmail.com](mailto:wacana.nasional@gmail.com). Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

## SUARA MERDEKA

Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press

Pendiri : H Hetami

Komisaris Utama : Ir Budi Santoso

Pemimpin Umum : Kukrit Suryo Wicaksono

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Gunawan Permadi

Direktur HRD dan Training Center :

Sara Ariana Fiestri

Wakil Pemimpin Redaksi: Triyanto Triwikromo. Sekretaris Redaksi: Setiawan Hendra Kelana. Redaktur Senior: Ananto Pradono. Redaktur Pelaksana: Hartono, Edy Muspriyanto, Saroni Asikin, Hasan Fikri. Koordinator Liputan: Nugroho Dwi Adiseno, Rukardi, Imam Nuryanto. Staf Redaksi: Darjo Soyat, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Dwi Ani Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Bina Septiriono, Edi Indarto, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Arwan Pursidi, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tawif Rudyanto, M Jokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Mohammad Saronji, Maratun Nashihah, Sarby SB Wetha, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhilia Amritrianto, Hartatik, Fani Ayudha, M Nurhafid, Valentina Esti. Litbang: Djurianto Prabowo (Kepala), Agus Wahyudi (Wakil Kepala), Sigit Oediarto, Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RP Arief Nugroho, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan, Castro Suwito, Dian Aprilianingrum, Gayuh Dikha Wicaksono, Nugroho Pandhu Sukmono, Ryan Rachman, Susanto, Teguh Hidayat Akbar. Biro Pantura: Nur Khoerudin (Kepala), Trias Purwadi, Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Arif Suryoto, Riyono Toepre, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessnasari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Muhammad Ali Basarah, Muhammad Firdaus Ghozali, Agus Setiawan, Dwi Putra Guntur Destowo, Joko Widodo, Kuswandi, Siti Masitoh, Siti Masudah Isnawati, Trisno Setiadi, Trisno Suhito. Biro Muria: Saiful Annas (Kepala), Prayitno, Djamil AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto An Wibowo, Moch Noor Efendi, Beni Dewa, Ilyas Mustofa, Septina Nafiyanti. Biro Kedu/DIY: Edy Purnomo (Kepala), Supriyanto, Arif Widodo, Asef Farid Amari. DI Yogyakarta: Agung Priyo, Amelia Hapsari, Dananjaya Kulungono. Bandung: Dwi Setiadi. Kepala Kantor Wilayah: Sri Hartono (Surakarta), Edi Purnomo (Kedu), Ariyanto (Muria). Alamat Redaksi: Jl Kawi 20 Semarang 50249. Faks: (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota/Sirkulasi: Jl Telaga Bodas No 14 Semarang. Telepon: 082223583388. Direktur Operasional: Heru Djatmiko, Wakil Direktur Operasional: Yoyok Gumulya. Direktur Keuangan & Pembukuan: Sumardi Suherman. Direktur Sales & Komunikasi: Bambang Pulinggono, Wakil Direktur Sales & Komunikasi: Agustina Purbandini. Senior Manager HRD: Hudawi. Senior Manager Sales Product: M Eko Fitrianto. Senior Manager General Affair: Bambang Supriyanto. Senior Manager Internal Audit: Ari Santoso. Manajer Produksi: Koko Andika. Alamat Iklan/Tata Usaha: Jl Kawi 20 Semarang 50252. Faks: (024) 86400570, 86400565. HOT LINE 24 JAM (024) 8454333. REDAKSI: (024) 6580900 Faks (024) 6580605. EMAIL REDAKSI: red\_sumer@yahoo.com. Dicetak oleh PT Ardas Karya Satria, isi di luar tanggung jawab percetakan.